

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BEKASI

Kokoh Prio Utomo, Deddy S Bratakusumah
Program Studi Administrasi Publik Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
prioutomo@gmail.com

Abstrak

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi salah satu tujuannya adalah agar daerah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, tapi faktanya jumlah investasi di Kab. Bekasi mengalami *trend* yang naik turun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi. Metodologi analisa data menggunakan uji regresi berganda dengan variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai variabel independen dan variabel iklim investasi sebagai variabel dependen. Hasil dan pembahasan analisis data menunjukkan bahwa variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi secara bersama-sama maupun secara individu masing-masing berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi kondusif. Variabel reformasi birokrasi dan variabel pelayanan publik sangat berpengaruh karena indikator variabel reformasi birokrasi yaitu pemerintah daerah Kab. Bekasi sangat mampu dalam menjalin sinergi (*networking*) dengan pemerintah daerah lain dan juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Sedangkan variabel pelayanan publik dikarenakan indikator prosedur pelayanan publik Pemda Kab. Bekasi sangat mudah dipahami oleh pelaksana maupun penerima pelayanan publik.

Kata Kunci : kebijakan, desentralisasi, reformasi birokrasi

Abstract

*Decentralization and regional autonomy policy, public services and bureaucracy reform the purpose is local government towards the creation of a conducive investment climate but the fact amount of investment in Bekasi District is become fluctuative. This study aims to determine the effect of decentralization and regional autonomy policy, public services and bureaucracy reform towards the creation of a conducive investment climate in Bekasi District. This research hope can use as advise improvement of decentralization and regional autonomy policy, public services and bureaucracy reform towards the creation of a conducive investment climate. The methodology of data analysis using multiple regression with variables of decentralization and regional autonomy, public services and bureaucracy reform as an independent variable and the investment climate variables as the dependent variable. Results and discussion of data analysis showed that the variables of decentralization and regional autonomy, public service and bureaucracy reform jointly or individually each influenced the creation of conducive investment climate. Bureaucracy reform variable and public service variable are very influential because of bureaucratic reform indicator variable that is local government of Bekasi is very capable in establishing synergy (*networking*) with other local governments and also central government for the orientation to seek appropriate services for the community. While the public services variable due to the indicator for local government public service of Bekasi very easily understood by implementers and recipients of public services.*

Keywords : policy, decentralization, reform of the

Pendahuluan

Keberadaan desentralisasi di Negara Indonesia telah menjadi kesepakatan nasional sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 amandemen kedua pasal 18 menyebutkan tentang penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Kesepakatan nasional mengenai desentralisasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia dijalankan atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya.

Perwujudan dan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan TAP MPR No. IV/WR/2000 yang menegaskan bahwa kebijakan otonomi daerah bersamaan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan ditujukan kepada pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemberian layanan publik dan pembangunan lokalitas (kreativitas pemerintah daerah, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat).

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan menyebabkan pemda melakukan penyesuaian administratif dalam bentuk struktur organisasi pemda dan pengaturan kepegawaian yang efektif dan efisien dan kebijakan pelayanan publik serta perumusan kebijakan publik yang menyerap aspirasi dan partisipasi berbagai kelompok masyarakat. Hal ini tentu tidak mudah dan sangat tergantung pada perubahan visi, misi, strategi, dan implementasi kebijakan Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Pemerintah Daerah sekarang memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga.

Di masa reformasi banyak yang optimis

bahwa kinerja birokrasi di Indonesia akan semakin membaik dan desentralisasi merupakan isu strategis yang menjadi perhatian dalam reformasi birokrasi. Konsep desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meletakkan perubahan mendasar dalam administrasi publik dalam arti administrasi pemerintahan. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam pasal 2 yang menjadi urusan pemerintah ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (3) yaitu pemerintah hanya mengelola enam bidang saja, yaitu (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama.

Terkait dengan pelayanan publik yang telah didesentralisasikan dan yang berpengaruh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif telah diatur atau menjadi urusan wajib pemerintahan kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 1).

Konsekuensi dari hal tersebut tentu memberikan pengaruh berupa perubahan kelembagaan yang sangat berarti yang tentunya membawa implikasi baru dalam manajemen publik dimana domain pemerintah berada direlasikan berdasarkan kondisi geografis dan demografis pemerintahan daerah masing-masing.

Daerah dengan kewenangan dan tanggungjawab yang diembannya dapat merancang dan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kondisi geografis dan demografisnya. Hal ini juga mendorong bangkitnya prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk menciptakan kerjasama yang harmonis dalam rangka membangun pelayanan yang baik.

Disamping itu, penerapan desentralisasi

kewenangan dan otonomi daerah juga merupakan prasyarat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya selama ini, dalam kebijakan otonomi daerah masih terdapat beberapa kelemahan, seperti : (a) Otonomi daerah hanya dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institutional belaka; (b) Perhatian dalam otonomi daerah hanya pada masalah pengalihan kewenangan dari Pusat ke Daerah, tetapi mengabaikan esensi dan tujuan kebijakan tersebut; (3) Otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan prakarsa masyarakat di daerah sesuai tuntutan alam demokrasi; dan (4) Konsep dasarnya yang mengandung prinsip-prinsip federalisme.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah akibat dari desentralisasi dan otonomi daerah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian adalah lebih pada implementasi kebijakan pelimpahan wewenang urusan wajib kepada pemerintah daerah seperti pelayanan publik dan reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi merupakan langkah konkret yang harus dijalankan dengan fungsi *fasilitator* pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan dengan mendatangkan penanaman modal atau investasi melalui para investor agar mau berinvestasi di daerahnya.

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia tidak mempunyai sumber dana yang cukup guna membiayai pembangunan negerinya. Sejalan dengan sasaran pembangunan yang dititikberatkan di bidang ekonomi yaitu penataan swastanisasi nasional yang mengarah pada penguatan, peningkatan, perluasan dan penyebaran sektor swasta ke seluruh wilayah Indonesia, maka investasi ke sektor swasta adalah pendukung pembangunan nasional untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan Indonesia mencakup pengembangan iklim usaha dan investasi, peningkatan swasta nasional pengembangan usaha kecil dan menengah.

Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan eko-

nomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penanam modal atau *investor* tentunya memiliki banyak pertimbangan dalam rencana akan menanamkan modalnya, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi *investor*. Faktor ekonomi adalah lebih pada perhitungan kelayakan usaha dari segi keuangan sedangkan faktor non ekonomi adalah lebih pada situasi dan kondisi tempat lingkungan usaha *investor* atau biasa disebut dengan iklim investasi misalnya infrastruktur, kepastian hukum, ketenagakerjaan, keamanan berusaha, kondisi pemerintahannya, dan sebagainya.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal atau investasi hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui :

1. Perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah;
2. Penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal;
3. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi;
4. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Faktor non ekonomi yang menjadi motivasi *investor* tentunya harus diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pelayanan publik merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan dan menjadi urusan wajib bagi daerah untuk pelaksanaannya.

Dilihat dari jenis output yang dihasilkan Pemda, maka hasil akhir pelayanan Pemda adalah tersedianya barang dan jasa (*public good and public regulation*). *Public good* tercermin dari diadakannya barang-barang untuk memenuhi kebutuhan publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, irigasi, pasar, terminal dsb. Sedangkan *public regulation* akan terwujud dalam bentuk mewajibkan penduduk untuk memiliki kartu tanda penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, IMB, HO (bila akan membuka usaha) dan bentuk-bentuk pengaturan lainnya yang pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan ketertarikan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat dilihat dari indikator sejauhmana keberhasilan pemerintah daerah (bersama DPRD dan masyarakatnya) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan yang diberikan bagi pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, dan sebagainya secara berkesinambungan. Untuk tujuan itu maka Pemda harus mampu menyediakan pelayanan-pelayanan publik (*public service*) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana yang telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah membutuhkan kerja birokrasi yang profesional. Kerja birokrasi yang profesional merupakan upaya penyesuaian-penyesuaian akibat dari desentralisasi yaitu penyesuaian struktur organisasi dan kepegawaian (SDM) serta budaya organisasi atau lebih biasa disebut dengan reformasi birokrasi.

Sejak reformasi bergulir yang sudah berjalan sekitar 12 tahun, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif yaitu dengan mengeluarkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi namun jika dibandingkan dengan data masuknya penanaman modal atau investasi di Indone-

Trend peningkatan pada PMA tidak terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN, yaitu mengalami *trend* naik turun sejak

Trend peningkatan dan penurunan tingkat investasi selama periode di atas menjadi dasar pemerintah untuk mengambil langkah. Walaupun demikian, banyak praktisi ekonomi serta pengamat yang menganggap tindakan pemerintah sudah terlambat, dimana Indonesia sudah terlanjur kehilangan momentum. Sudah cukup banyak *investor* yang menutup dan memindahkan usahanya ke negara lain karena tidak cukup kondusifnya iklim investasi di Indonesia.

Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terdapat beberapa kabupaten/kota lainnya yang pemerintah daerahnya sangat *concern* dalam menarik *investor* untuk menanamkan modal di daerahnya, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur yang proaktif mengembangkan potensi SDM dan usaha agro in-

sia hal tersebut belum nampak signifikan secara *time series*.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 ditetapkan pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional 6,6%. Dengan pertumbuhan rata-rata tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 8,2% dan mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,2% pada tahun 2009. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut diperlukan investasi sekitar US\$ 426 milyar. Investasi tersebut dapat berupa investasi atau dana yang berasal dari APBN atau APBD, masyarakat maupun swasta nasional dan swasta asing. Akibat terbatasnya kondisi tersebut di atas, maka investasi luar negeri menjadi andalan utama untuk mendorong perekonomian nasional.

Setelah terjadinya krisis di tahun 1997, PMA dan PMDN mengalami penurunan yang cukup drastis. PMA jatuh dari posisi 33.788,8 juta dolar AS di 1997 ke 10.884,5 juta dolar AS di tahun 1999. Lebih lanjut apabila kita melihat kondisi investasi di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya otonomi daerah dan berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia pada periode 2005-2008 mengalami trend peningkatan sejak tahun 2006,

tahun 2005 ke 2008 seperti yang digambarkan pada gambar di bawah (lihat grafik 2).

dustri walaupun daerahnya kaya Sumber Daya Alam (SDA), kabupaten Kebumen yang menekankan *good governance*, kabupaten Bekasi yang memanfaatkan peluang ekonomi dari Jakarta, kabupaten Sumedang yang terus membenahi tata ruangnya, kota Semarang yang mengedepankan efisiensi perijinan usaha, pembentukan Kantor Pelayanan Satu Atap (KPSA) bagi pemerintah kabupaten Jepara yang juga menelurkan kebijakan bebas pajak (*tax holiday*) bagi para *investor*.

Khusus untuk kabupaten Bekasi yang juga sedang berupaya menarik *investor* memiliki data *trend* yang naik turun juga terhadap masuknya investasi. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Kabupaten Bekasi, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Da-

lam Negeri (PMDN) pada periode 2002-2006 mengalami *trend* yang naik turun.

Investasi yang disebut-sebut sebagai *engine of growth* dilihat dari perkembangan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 mengalami *trend* naik turun padahal peningkatan investasi secara konstan diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif di Kabupaten Bekasi secara konstan pula. Apakah yang terjadi pada daya tarik iklim investasi Kabupaten Bekasi? Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Kab. Bekasi berupaya mendorong masuknya investasi. Sebagaimana disebutkan oleh Bupati Bekasi Sa'aduddin, "bahwa menarik minat swasta untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Bekasi bukan perkara sepele. Sebab, para *investor* butuh kepastian hukum dan iklim yang kondusif. Terutama masalah birokrasi dan perizinan usaha yang berbelit-belit". (www.detiknews.com, Kamis, 15/04/2010 12 : 17 WIB).

Menyelesaikan masalah peningkatan masuknya investasi terutama pada masalah birokrasi dan perizinan usaha yang berbelit-belit membutuhkan *political will* dari pemimpin daerah, berkat diskresi yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pemda melakukan penataan melalui berbagai bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan bagi pemenuhan ke-butuhan dasar (*basic needs*) masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, dan sebagainya secara berkesinambungan serta reformasi birokrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini berusaha untuk menganalisa apakah ada pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan studi kasus pada pemerintahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Hipotesis Penelitian

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah merupakan implementasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sehingga membuat daerah lebih leluasa dalam me-

lakukan pengelolaan pemerintahannya khususnya dalam bidang pelayanan publik dan melakukan reformasi birokrasinya.

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Perubahan atau reformasi dalam birokrasi adalah perubahan penyelenggaraan pemerintahan menuju suatu keadaan yang lebih baik khususnya terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Oleh sebab itu, dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₀ : tidak ada hubungan atau pengaruh antara kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif.

H₁ : ada hubungan atau pengaruh antara kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan hipotesis yang hendak diuji maka desain penelitian yang digunakan oleh peneliti ada 2 (dua) jenis, pertama, desain kausal, yaitu suatu desain yang berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain (Husein Umar, 2008). Kedua adalah desain penelitian kebijakan yaitu sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan (Sudarwan Danim, 2000).

Ann Majchrzak (1984) (dalam Sudarwan Danim) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap ma-

salah-masalah *social* yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik.

Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Didalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, dapat melalui data hasil dokumentasi. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden. Teknik pengambilan *sample* pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu setiap unit/individu yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja menurut pertimbangan tertentu. Sehingga tidak semua populasi memiliki kesempatan sama untuk menjadi calon responden atau sampel. Sedangkan teknik *non probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian. Artinya setiap unit/individu yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu (Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007). Pertimbangan menurut penelitian ini adalah bahwa calon responden telah mempunyai nilai obyektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan/pengertian/kepercayaan individu tentang obyek sikap (kognitif) karena pengalaman, lamanya seseorang mengalami aktivitas (bekerja) atau menghadapi persoalan yang diteliti. Kuesioner yang digunakan untuk *survey* dirumuskan secara terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan *central limit theorem*, distribusi rata-rata sampel dari populasi (semua sampel dengan ukuran yang sama dari suatu populasi) dengan ukuran 30 atau lebih ($n \geq 30$) dianggap normal, tidak peduli apakah distribusi populasinya normal atau tidak. Jika kurang dari 30, distribusi yang dihasilkan tidak normal apabila distribusi populasinya tidak normal. Ada beberapa ketentuan dimana jika sampelnya kurang dari 30, teknik statistik yang digunakan masuk kategori *parametric* tidak dapat digunakan (Ronny Kountur, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini

ditentukan jumlah responden sebanyak 50 orang. Populasi responden sasaran adalah :

1. Para pejabat atau pegawai yang berwenang di institusi dinas perindustrian, dinas tenaga kerja, dinas pekerjaan umum, dinas penanaman modal dan dinas perdagangan,
2. Para pengusaha yang sedang mengurus ijin penanaman modal,
3. Masyarakat pemerhati pelayanan publik.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang ada berupa laporan peningkatan kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB dan Penerimaan Asli Daerah/PAD), infrastruktur, ketenagakerjaan, tingkat investasi, serta ekonomi daerah. Pengumpulan data yang berupa *existing statistic* (data sekunder) dilakukan dengan mengumpulkan data-data statistik daerah yang berasal dari berbagai laporan yang diberikan oleh lembaga pemerintah (seperti BPS, BI, Depdagri, Pemda, dll), serta berbagai laporan penelitian sebelumnya.

Uji Kualitas Data

Data-data yang telah dikumpulkan harus diuji dulu untuk mengetahui kelayakannya. Hanya data yang layaklah yang bisa dipakai untuk dianalisis. Beberapa uji yang berkaitan dengan kualitas data adalah :

1. Uji normalitas;

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah *variable* dependen, independen atau keduanya tidak berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Jika datanya ternyata tidak berdistribusi normal, maka analisis non parametrik dapat digunakan. Jika data berdistribusi normal, maka analisis parametrik termasuk model-model regresi dapat digunakan (Husein Umar).

Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji *statistic* (Imam Ghazali, 2001). Analisis grafik dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain grafik histogram, untuk lebih tepatnya hasil analisis uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan *ploting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji statistik untuk melihat normalitas data dapat dilakukan dengan uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness* dari residual.

2. Uji validitas dan reliabilitas kusioner

Uji validitas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus diperbaiki atau dihilangkan karena tidak mencerminkan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau variabel. SPSS memberikan fasilitas untuk uji korelasi *bivariate* ini (Imam Ghozali, Ibid).

Sedangkan uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah kuesioner dapat dipakai berulang-ulang. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuisisioner yang telah lolos uji yang dapat dipakai untuk diisi data dari responden.

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan cara yaitu *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan dengan uji *statistic Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau *variable* dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60 (Imam Ghozali, Ibid).

3. Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk mengetahui hubungan diantara variabel-variabel penyebab (independen). Jika terjadi hubungan yang kuat, maka harus dilemahkan. Jika tidak berhasil, salah satu variabel independen tersebut harus dikeluarkan dari penelitian karena dianggap tumpang tindih/mirip dengan salah satu variabel bebas lainnya.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya

korelasi antar *variable* bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara *variable* independen.

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Jadi multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independent*. Konsekuensi dari multikolinieritas adalah sebagai berikut : Apabila ada kolinieritas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah :

a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

Dasar analisis :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Cara yang lain untuk menguji heteroskedastisitas adalah uji *Park*, uji *Glejser* dan Uji *White*, namun dalam penelitian ini lebih memanfaatkan pada melihat grafik plot.

Metode Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (desentralisasi dan otonomi daerah, reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik) terhadap variabel dependen (iklim investasi kondusif). Data yang dimiliki diukur dengan skala interval yaitu yang didasarkan pada rangking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya, skala interval termasuk dalam golongan metrik dan oleh karena ingin mengetahui hasil pengujian secara simultan terhadap variabel dependen, maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Data-data primer yang diperoleh dari kuesioner diolah dengan bantuan SPSS Ver. 16 dan *Microsoft Office Excel 2007* sehingga diperoleh tabulasi yang menunjukkan intensitas tiap-tiap indikator pemeringkatan.

Analisis lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan dengan metodologi bahwa analisis kebijakan publik sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional seperti ilmu politik yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik. Yang ingin dicari pengetahuannya adalah tentang sebab akibat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan pelayanan publik dan kebijakan reformasi birokrasi terhadap iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi melalui

wawancara mendalam terhadap responden kunci yang memahami betul situasi dan kondisi tersebut.

Data-data sesuai dengan indikator penelitian terdiri dari data primer kualitatif yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber, seperti aparat Dinas Industri, Perdagangan, dan Penanaman Modal dan Kadin Kabupaten Bekasi. Data primer kuantitatif yaitu berupa hasil kuantifikasi dari keadaan kualitatif yang merupakan penilaian masyarakat atas pelayanan publik, didapat melalui hasil survei dengan instrumen kuesioner.

Analisis data menggunakan analisis kuantitatif, yang terjadi secara bersamaan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penafsiran digunakan untuk menafsirkan makna di balik informasi dan data yang diperoleh serta berusaha untuk menarik kesimpulan dari informasi dan data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Untuk memberikan gambaran analisis statistik deskriptif, berikut disajikan hasil keluaran *computer* terhadap analisis deskriptif.

Tabel 14. Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Skewness</i>	<i>Kurtosis</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>
Desentralisasi dan Otonomi Daerah	50	1.12	4.75	2.7733	.89330	.623	.337	-.274	.662
Pelayanan Publik	50	1.00	4.90	2.7470	.97433	.430	.337	-.355	.662
Reformasi Birokrasi	50	1.67	4.93	2.8934	.85122	.722	.337	-.051	.662
Iklim Investasi	50	1.96	4.46	3.0096	.64496	.516	.337	-.252	.662
<i>Valid N (listwise)</i>	50								

Output tampilan SPSS menunjukkan jumlah responden (N) ada 50, dari 50 responden ini

pendapat terhadap variabel desentralisasi dan otonomi daerah terkecil adalah 1,12 dan terbesar (*maximum*) adalah 4,75, untuk pendapat terhadap variabel pelayanan publik terkecil adalah 1,00 dan terbesar (*maximum*) adalah 4,9, untuk pendapat terhadap variabel reformasi birokrasi terkecil adalah 1,67 dan terbesar (*maximum*) adalah 4,93, untuk pendapat terhadap *variable* iklim investasi terkecil adalah 1,96 dan terbesar (*maximum*) adalah 4,46. *Skewness* dan *kurtosis* merupakan ukuran untuk melihat apakah data desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan iklim investasi kondusif terdistribusi secara normal atau tidak. *Skewness* mengukur kemencengan dari data dan *kurtosis* mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal mempunyai ni-

lai *skewness* dan *kurtosis* mendekati nol. Hasil tampilan *output* SPSS memberikan nilai *skewness* dan *kurtosis* untuk variabel desentralisasi dan otonomi daerah, masing-masing adalah 0,623 dan -0,274, untuk variabel pelayanan publik, masing-masing adalah 0,430 dan -0,355, untuk *variable* reformasi birokrasi, masing-masing adalah 0,722 dan -0,051 untuk *variable* iklim investasi, masing-masing adalah 0,516 dan -0,252 sehingga dapat disimpulkan bahwa data seluruh variabel terdistribusi secara normal.

Karakteristik Responden

Berdasarkan keluaran *computer* di bawah ini, diketahui bahwa data valid sebanyak 50 responden dan 0 responden *missing* artinya data terisi semua.

Tabel 15. Statistik Karakteristik Responden

		Jenis Kelamin Responden	Pendidikan Responden	Pekerjaan Responden
N	Valid	50	50	50
	Missing	0	0	0
Mean		1.2800	2.1000	1.9200
Median		1.0000	2.0000	2.0000

Berdasarkan keluaran *computer* di bawah ini, perihal jenis kelamin, diketahui bahwa 36 responden (72%) berjenis kelamin laki-laki dan

14 responden (28%) berjenis kelamin perempuan.

Tabel 16. Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	36	72.0	72.0	72.0
	Perempuan	14	28.0	28.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

Berdasarkan keluaran *computer* di bawah ini, perihal tingkat pendidikan, terdapat 8 orang responden (16%) berpendidikan D1-D3-D4, 29

orang responden (58%) berpendidikan S1 dan 13 orang responden (26%) berpendidikan S2.

Tabel 17. Pendidikan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D1-D3-D4	8	16.0	16.0	16.0
	S1	29	58.0	58.0	74.0
	S2	13	26.0	26.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan keluaran *computer* di bawah ini, perihal bidang kerja, diketahui bahwa 16 orang responden (32%) bekerja sebagai PNS/

TNI/POLRI, 22 orang responden (44%) bekerja sebagai pegawai, swasta, 12 orang responden (24%) bekerja sebagai Wiraswasta/usahawan.

Tabel 18. Pekerjaan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS/TNI/POLRI	16	32.0	32.0	32.0
	Pegawai Swasta	22	44.0	44.0	76.0
	Wiraswasta/Usahawan	12	24.0	24.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Statistik Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Berdasarkan keluaran komputer di bawah ini, yaitu beberapa statistik mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, diketahui bahwa secara umum desentralisasi dan otonomi daerah dinilai dengan skor 5 atau agak baik. Dari setiap indikator dinilai antara cukup dan agak

baik (rentang 4 - 5). Akan tetapi, untuk *item* Desentralisasi dan Otonomi Daerah 6 (dukungan alokasi pendanaan struktur kelembagaan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan pembangunan) dinilai agak kurang dengan skor 2,5200, oleh karena itu pembahasan akan difokuskan pada keadaan ini.

Tabel 19. Statistik Deskriptif Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

	N	Mean	Std. Deviation
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1	50	2,70000	1,03510
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2	50	2,80000	1,01015
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 3	48	3,02080	1,22890
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 4	50	2,76000	1,02140
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 5	50	2,92000	1,02698
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 6	50	2,52000	0,76238
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 7	48	2,79170	1,07106
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 8	50	2,72000	1,12558
Valid N (listwise)	48		

Statistik Pelayanan Publik

Berdasarkan keluaran komputer di bawah ini, yaitu beberapa statistik mengenai pelayanan publik, diketahui bahwa secara umum pelayanan publik dinilai dengan skor 5 atau agak baik. Dari setiap indikator dinilai antara cukup

dan agak baik (rentang 4 - 5). Akan tetapi, untuk *item* Pelayanan Publik 5 (Tingkat perbedaan implementasi prosedur dengan prosedur ditetapkan) dinilai agak kurang dengan skor 2,2826, oleh karena itu pembahasan akan difokuskan pada keadaan ini.

Tabel 20. Statistik Deskriptif Pelayanan Publik

	N	Mean	Std. Deviation
Pelayanan Publik 1	50	2,74000	1,10306
Pelayanan Publik 2	49	2,95920	1,13577
Pelayanan Publik 3	50	2,94000	1,11410
Pelayanan Publik 4	50	3,08000	1,27520
Pelayanan Publik 5	46	2,28260	1,06798
Pelayanan Publik 6	50	2,72000	1,08872
Pelayanan Publik 7	50	2,80000	1,17803
Pelayanan Publik 8	50	2,52000	1,01499
Pelayanan Publik 9	46	2,45650	1,10969
Pelayanan Publik 10	50	2,72000	1,14357
Valid N (listwise)	46		

Statistik Reformasi Birokrasi

Berdasarkan keluaran komputer di ba-

wah ini, yaitu beberapa statistik mengenai reformasi birokrasi, diketahui bahwa secara umum

reformasi birokrasi dinilai dengan skor 5 atau agak baik. Dari setiap indikator dinilai antara cukup dan agak baik (rentang 4 - 5). Akan tetapi, untuk *item* Reformasi Birokrasi 4 (Peningkatan

alokasi anggaran SKPD Pemda Kab. Bekasi) dinilai agak kurang dengan skor 2,5800, oleh karena itu pembahasan akan difokuskan pada keadaan ini.

Tabel 21. Statistik Deskriptif Reformasi Birokrasi

	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Reformasi Birokrasi 1	50	2,96000	1,06828
Reformasi Birokrasi 2	50	2,82000	1,02400
Reformasi Birokrasi 3	48	2,68750	0,94882
Reformasi Birokrasi 4	50	2,58000	0,92780
Reformasi Birokrasi 5	42	2,59520	0,91223
Reformasi Birokrasi 6	50	3,04000	1,06828
Reformasi Birokrasi 7	50	2,74000	1,10306
Reformasi Birokrasi 8	50	2,86000	0,96911
Reformasi Birokrasi 9	50	3,10000	0,86307
Reformasi Birokrasi 10	50	3,18000	0,94091
Reformasi Birokrasi 11	50	2,94000	0,91272
Reformasi Birokrasi 12	50	2,80000	0,92582
Reformasi Birokrasi 13	50	2,90000	1,03510
Reformasi Birokrasi 14	50	2,82000	1,04374
Reformasi Birokrasi 15	50	3,26000	1,06541
<i>Valid N (listwise)</i>	42		

Statistik Iklim Investasi Kondusif

Berdasarkan keluaran komputer di bawah ini, yaitu beberapa statistik mengenai iklim investasi kondusif, diketahui bahwa secara umum iklim investasi kondusif dinilai dengan skor 5 atau agak baik. Dari setiap indikator dini-

lai antara cukup dan agak baik (rentang 4 - 5). Akan tetapi, untuk *item* Iklim Investasi 22 (Tingkat kualitas infrastruktur pendukung usaha/bisnis bidang transportasi) dinilai agak kurang dengan skor 2,7000, oleh karena itu pembahasan akan difokuskan pada keadaan ini.

Tabel 22. Statistik Deskriptif Iklim Investasi Kondusif

	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Std.Deviation</i>
Iklim Investasi 1	50	3,08000	0,98644
Iklim Investasi 2	50	3,30000	0,93131
Iklim Investasi 3	50	2,76000	1,00122
Iklim Investasi 4	50	3,14000	0,98995
Iklim Investasi 5	50	3,14000	1,08816
Iklim Investasi 6	50	2,90000	0,90914
Iklim Investasi 7	50	2,96000	0,87970
Iklim Investasi 8	50	3,12000	0,96129
Iklim Investasi 9	50	3,40000	1,06904
Iklim Investasi 10	50	2,86000	0,75620
Iklim Investasi 11	50	3,44000	0,99304
Iklim Investasi 12	50	2,90000	0,88641
Iklim Investasi 13	50	3,04000	0,72731
Iklim Investasi 14	50	3,54000	0,67643
Iklim Investasi 15	50	3,10000	0,78895
Iklim Investasi 16	50	3,02000	0,86873
Iklim Investasi 17	50	2,90000	0,73540
Iklim Investasi 18	50	2,84000	0,84177
Iklim Investasi 19	50	2,92000	0,72393
Iklim Investasi 20	50	2,94000	0,91272
Iklim Investasi 21	50	2,84000	0,76559
Iklim Investasi 22	50	2,70000	0,97416
Iklim Investasi 23	49	2,81630	0,85813

Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Reliabilitas Kuesioner

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat dipakai berulang-ulang sebagai ciri dari *instrument* yang reliabel. Uji dilakukan untuk *item-item* pertanyaan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan iklim investasi kondusif.

Keluaran *computer* di bawah ini merupakan hasil uji dari item-item pertanyaan desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk hasil uji reliabilitas, karena diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,951 lebih besar dari 0,7 maka kuesioner dikatakan *reliabel*.

Tabel 23. Hasil Uji Reliabilitas Desentralisasi Dan Otonomi Daerah
Case Processing Summary

		<i>N</i>	<i>%</i>
<i>Cases</i>	<i>Valid</i>	48	96.0
	<i>Excluded^a</i>	2	4.0
	<i>Total</i>	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.951	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item - Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Desentralisasi dan Otda 1	19.6458	41.042	.780	.947
Desentralisasi dan Otda 2	19.5000	42.298	.707	.951
Desentralisasi dan Otda 3	19.3125	38.092	.863	.942
Desentralisasi dan Otda 4	19.5833	39.695	.908	.939
Desentralisasi dan Otda 5	19.3750	40.282	.868	.941
Desentralisasi dan Otda 6	19.7917	44.466	.743	.950
Desentralisasi dan Otda 7	19.5417	40.381	.820	.944
Desentralisasi dan Otda 8	19.5833	38.759	.891	.939

Untuk uji kuesioner *item-item* pertanyaan pelayanan publik hasilnya *reliabel* karena diketahui bahwa nilai *cronbach Alpha* sebesar 0,959 lebih besar dari 0,7 maka kuesioner dikatakan *reliabel*. Keluaran *computer* terhadap hasil uji kuesioner *item-item* pertanyaan pelayanan publik adalah sebagaimana disajikan di bawah ini.

		N	%
Cases	Valid	46	92.0
	Excluded ^a	4	8.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 24. Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Publik
Case Processing Summary

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.959	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pelayanan Publik 1	23.913	75.059	.857	.953
Pelayanan Publik 2	23.652	75.343	.791	.955
Pelayanan Publik 3	23.695	74.705	.848	.953
Pelayanan Publik 4	23.543	72.743	.806	.955
Pelayanan Publik 5	24.260	78.597	.663	.960
Pelayanan Publik 6	23.869	73.094	.941	.949
Pelayanan Publik 7	23.782	71.729	.928	.949
Pelayanan Publik 8	24.152	77.465	.829	.954
Pelayanan Publik 9	24.087	75.592	.802	.955
Pelayanan Publik 10	23.934	76.729	.726	.958

Untuk uji kuesioner *item-item* pertanyaan reformasi birokrasi hasilnya dan *reliabel* karena diketahui bahwa nilai *cronbach* sebesar 0,97 lebih besar dari 0,7 maka kuesioner dikatakan *reliabel*. Keluaran *computer* terhadap hasil uji kuesioner *item-item* pertanyaan reformasi birokrasi adalah sebagaimana disajikan di bawah ini.

Tabel 25. Hasil Uji Reliabilitas Reformasi Birokrasi
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	42	84.0
	Excluded ^a	8	16.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.978	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Reformasi Birokrasi 1	397.857	161.880	.752	.978
Reformasi Birokrasi 2	399.048	158.527	.919	.975
Reformasi Birokrasi 3	399.048	160.722	.873	.976
Reformasi Birokrasi 4	400.952	161.015	.866	.976
Reformasi Birokrasi 5	400.000	164.780	.779	.977
Reformasi Birokrasi 6	396.429	161.503	.771	.978
Reformasi Birokrasi 7	400.000	157.659	.920	.975
Reformasi Birokrasi 8	397.857	161.733	.794	.977
Reformasi Birokrasi 9	394.286	165.909	.732	.978
Reformasi Birokrasi 10	394.762	159.963	.912	.975
Reformasi Birokrasi 11	396.905	159.877	.926	.975
Reformasi Birokrasi 12	397.857	160.221	.900	.976
Reformasi Birokrasi 13	396.667	158.472	.862	.976
Reformasi Birokrasi 14	397.619	157.698	.882	.976
Reformasi Birokrasi 15	394.048	156.247	.931	.975

Sedangkan untuk uji kuesioner *item-item* pertanyaan iklim investasi kondusif hasilnya *reliabel* karena diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,978 lebih besar dari 0,7 maka kuesioner dikatakan *reliabel*. Keluaran *computer* terhadap hasil uji kuesioner *item-item* pertanyaan iklim investasi adalah sebagaimana disajikan di bawah ini.

Tabel 26. Hasil Uji Reliabilitas Iklim Investasi Kondusif

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	49	98.0
	Excluded ^a	1	2.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.965	28

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Iklm Investasi 1	811.020	297.344	.783	.963
Iklm Investasi 2	809.184	307.743	.523	.965
Iklm Investasi 3	814.286	295.708	.820	.962
Iklm Investasi 4	810.816	305.535	.558	.964
Iklm Investasi 5	810.816	304.660	.523	.965
Iklm Investasi 6	812.857	296.167	.893	.962
Iklm Investasi 7	812.245	297.678	.873	.962
Iklm Investasi 8	810.612	298.559	.767	.963
Iklm Investasi 9	808.163	306.861	.467	.965
Iklm Investasi 10	813.469	305.648	.730	.963
Iklm Investasi 11	807.755	319.094	.149	.968
Iklm Investasi 12	812.857	305.292	.612	.964
Iklm Investasi 13	811.429	307.792	.656	.964
Iklm Investasi 14	806.531	314.898	.409	.965
Iklm Investasi 15	810.816	307.993	.594	.964
Iklm Investasi 16	811.633	300.681	.781	.963
Iklm Investasi 17	812.857	315.958	.330	.966
Iklm Investasi 18	813.469	299.648	.845	.962
Iklm Investasi 19	812.653	304.407	.795	.963
Iklm Investasi 20	812.449	298.814	.802	.962
Iklm Investasi 21	813.469	302.273	.832	.962
Iklm Investasi 22	814.694	295.921	.842	.962
Iklm Investasi 23	813.673	299.404	.845	.962
Iklm Investasi 24	810.612	299.017	.812	.962
Iklm Investasi 25	812.857	299.375	.809	.962
Iklm Investasi 26	812.653	303.241	.781	.963
Iklm Investasi 27	812.653	293.824	.871	.962
Iklm Investasi 28	813.061	295.342	.765	.963

2. Uji Validitas Kuesioner

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas bertujuan untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak sehingga harus diganti. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Uji validitas dilakukan untuk *item-item* pertanyaan variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan iklim investasi kondusif.

Uji validitas salah satunya dilakukan dengan cara melakukan korelasi *bivariate* antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Uji validitas kuesioner

dengan *item-item* pertanyaan pada variabel desentralisasi dan otonomi daerah disajikan pada tampilan *output* SPSS di bawah ini.

Dari tampilan *output* SPSS terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator (desentralisasi dan otoda 1 sampai desentralisasi dan otoda 8) terhadap total skor konstruk (desentralisasi dan otoda) menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian halnya untuk korelasi antara masing-masing indikator (pelayanan publik 1 sampai pelayanan publik 10) terhadap total skor konstruk (pelayanan publik) menunjukkan hasil yang signifikan dan juga korelasi antara masing-masing indikator (reformasi birokrasi 1 sampai reformasi birokrasi 15) terhadap total skor konstruk (reformasi birokrasi) menunjukkan hasil yang signifikan serta korelasi antara masing-masing indikator (iklim investasi kondusif 1 sampai iklim investasi kondusif 28) terhadap total skor

konstruk (iklim investasi kondusif) menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil tampilan *output* SPSS terhadap uji validasi disajikan pada lampiran 4, lampiran 5, lampiran 6 dan lampiran 7.

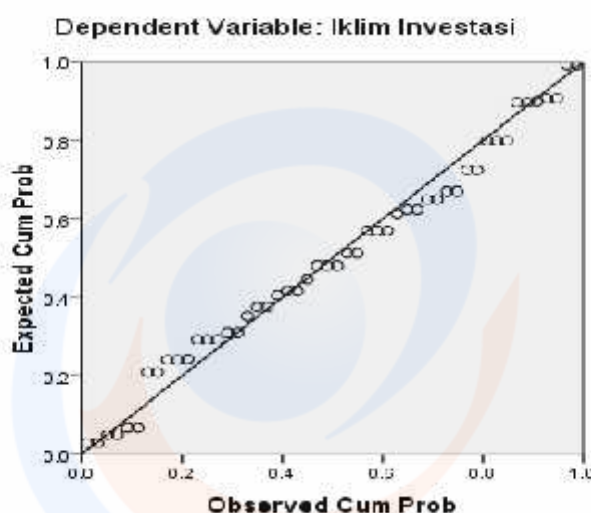
3. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji grafik *normal plot* karena metode

yang lebih handal adalah dengan melihat "*Normal Probability Plot*" yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Hasil keluaran *computer* terhadap uji grafik *normal plot* adalah sebagaimana ditampilkan pada grafik 5 di bawah ini.

Grafik 5. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik tersebut di atas tampak bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Maka, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kuat hubungan antarvariabel bebas (dalam hal ini desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi). Jika terdapat hubungan yang kuat, telah terjadi

multikolinieritas diantara ketiga *variable* sehingga perlu upaya agar tidak terjadi multikolinieritas, misalnya dengan penambahan data.

Berdasarkan keluaran *computer* di bawah ini diketahui bahwa hubungan antar variabel yang paling kuat terjadi antara variabel pelayanan publik dengan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu adalah -0,62 atau sekitar 62%. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 95% maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

Tabel 27. Koefisien Korelasi / Coefficient Correlations(a)

Model		Reformasi Birokrasi	Desentralisasi dan Otonomi	Pelayanan Publik
1	<i>Correlations</i>	Reformasi Birokrasi	1.000	-.241
		Desentralisasi dan Otonomi	-.241	1.000
		Pelayanan Publik	-.519	-.620
	<i>Covariances</i>	Reformasi Birokrasi	.003	.000
		Desentralisasi dan Otonomi	.000	.003
		Pelayanan Publik	-.002	-.002

a. *Dependent Variable* : Iklim Investasi

Untuk hasil perhitungan nilai *Tolerance* (TOL) (tabel 29) juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%.

Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) (tabel 29) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 28. Statistik Kolinear / Coefficients(a)

Model	Unstandardize Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.935	.076	12.281	.000			
	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	.163	.055	.226	2.991	.004	.182	5.502
	Pelayanan Publik	.205	.057	.309	3.601	.001	.141	7.094
	Reformasi Birokrasi	.366	.053	.483	6.965	.000	.216	4.633

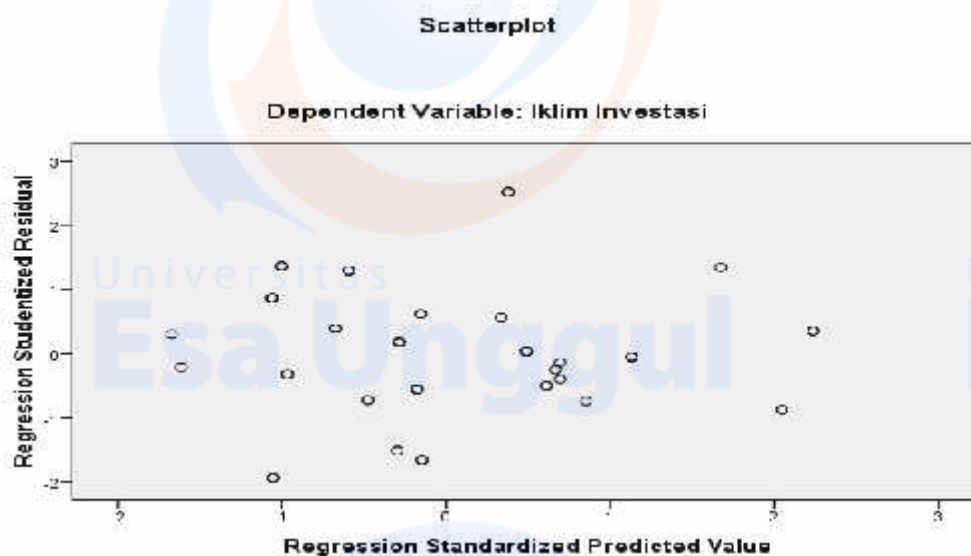
a. Dependent Variable : Iklim Investasi

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk penelitian ini

adalah sebagaimana dihasilkan pada gambar grafik keluaran *computer* di bawah ini.

Grafik 6. Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Persamaan regresi yang terjadi memiliki sifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik yang terjadi tidak mengikuti pola yang diharapkan. Pola yang diharapkan adalah titik-titik yang terjadi membentuk pola sebaran yang meningkat, yaitu secara terus menerus bergerak menjauhi garis 0 (nol). Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel iklim investasi kondusif berdasarkan masukan variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi.

Pengujian Hipotesis

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3 Metodologi Penelitian bahwa hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut :

H₀ : tidak ada hubungan atau pengaruh antara kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif.

H₁ : ada hubungan atau pengaruh antara kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (desentralisasi dan otonomi daerah, reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik) terhadap variabel dependen (iklim investasi kondusif). Data yang dimiliki diukur dengan skala interval yaitu yang

didasarkan pada rangking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya, skala interval termasuk dalam golongan metrik dan oleh karena ingin mengetahui hasil pengujian secara simultan terhadap variabel dependen, maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan program SPSS maka hasil analisis regresi berganda adalah disajikan pada beberapa keluaran (*output*) komputer di bawah ini.

Output bagian pertama dan kedua dari analisis regresi berganda :

Tabel 29. Statistik Deskriptif Regresi Berganda

	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>N</i>
Iklim Investasi	3.0096	.64496	50
Desentralisasi dan Otoda	2.7733	.89330	50
Pelayanan Publik	2.7470	.97433	50
Reformasi Birokrasi	2.8934	.85122	50

Tabel 30. Koefisien Korelasi

		Iklim Investasi	Desentralisasi dan Otoda	Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi
<i>Pearson Correlation</i>	Iklim Investasi	1.000	.910	.937	.945
	Desentralisasi dan Otoda	.910	1.000	.898	.839
	Pelayanan Publik	.937	.898	1.000	.878
	Reformasi Birokrasi	.945	.839	.878	1.000
<i>Sig. (1-tailed)</i>	Iklim Investasi	.	.000	.000	.000
	Desentralisasi dan Otoda	.000	.	.000	.000
	Pelayanan Publik	.000	.000	.	.000
	Reformasi Birokrasi	.000	.000	.000	.
<i>N</i>	Iklim Investasi	50	50	50	50
	Desentralisasi dan Otoda	50	50	50	50
	Pelayanan Publik	50	50	50	50
	Reformasi Birokrasi	50	50	50	50

Tabel koefisien korelasi menunjukkan bahwa analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Disini akan disoroti dua aspek untuk analisis korelasi, yaitu 1) apakah data sampel yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan antara variabel-variabel dalam populasi asal sampel. 2) jika ada hubungan, seberapa kuat hubungan antar varia-

bel tersebut. Keeratan hubungan tersebut dinyatakan dengan nama koefisien korelasi (atau yang biasa disebut korelasi saja).

Analisis :

1. Arti Angka Korelasi

Berkenaan dengan besaran angka. Angka korelasi berkisar pada 0 (tidak ada korelasi sama sekali) dan 1 (korelasi sempurna). Sebenarnya tidak ada ketentuan yang tepat mengenai apakah angka korelasi tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi atau lemah. Namun bias dijadikan pedoman sederhana, bahwa angka korelasi

di atas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedang di bawah 0,5 korelasi lemah.

Seperti angka pada *output* dengan nilai yaitu korelasi antara iklim investasi dengan desentralisasi dan otonomi daerah adalah 0,910, korelasi variabel iklim investasi dengan pelayanan publik adalah 0,937 dan korelasi variabel iklim investasi dengan reformasi birokrasi adalah 0,945. Secara teoritis, karena korelasi antara iklim investasi dan reformasi birokrasi adalah yang paling besar, maka variabel reformasi birokrasi lebih berpengaruh terhadap iklim investasi dibanding variabel yang lainnya.

2. Signifikansi Hasil Korelasi

Setelah angka korelasi didapat, bagian kedua dari *output* SPSS adalah menguji apakah angka korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel.

Hipotesis :

H₀ : Tidak ada hubungan (korelasi) antara dua variabel atau angka korelasi 0

H₁ : ada hubungan (korelasi) antara dua variabel

atau angka korelasi tidak 0

Uji dilakukan **satu sisi** karena akan dicari ada atau tidak ada hubungan/korelasi, dan bukan lebih besar/kecil.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika probabilitas > 0,05, maka H₀ diterima

Jika probabilitas < 0,05, maka H₀ ditolak

Keputusan :

Pada bagian kedua *output* (kolom Sig. (1-tailed)) didapat serangkaian angka probabilitas. Hasil olah data, sebagaimana disajikan pada tabel 30 di atas membuktikan bahwa tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari *output* (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,000, 0,000 dan 0,000 dan angka probabilitas ini jauh lebih kecil dari 0,05, maka korelasi diantara variabel iklim investasi dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi sangat nyata.

Output bagian ketiga dan keempat dari analisis regresi berganda :

Tabel 31. Variabel Entered

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Reformasi, Birokrasi, Desentralisasi dan Otonomi, Pelayanan Publik ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable : Iklim Investasi

Tabel 32. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976 ^a	.952	.949	.14555

a. Predictors : (Constant), Reformasi Birokrasi, Desentralisasi dan Otonomi, Pelayanan Publik

b. Dependent Variable : Iklim Investasi

Analisis :

1. Tabel *VARIABLES ENTERED* menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan (*removed*) atau dengan kata lain ketiga variabel bebas dimasukkan dalam perhitungan regresi.
2. Keterangan tabel menunjukkan bahwa R (koefisien korelasi) adalah sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam pembahasan disini lebih dijelaskan pada nilai koefisien determinasi/*R Square* (R²) pada inti-

nya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determi-

nasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana yang model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3. Angka *R square* (R^2) adalah 0,952. Hal ini berarti 95,2% iklim investasi bisa dijelaskan oleh

variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Sedangkan sisanya (100%-95,2%=04,8%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

4. *Standard Error of Estimate* (SEE) adalah 0,145 sedangkan pada analisis sebelumnya, bahwa standard deviasi iklim investasi adalah 0,64 yang artinya lebih besar dari 0,145. Karena *Standard Error of Estimate* lebih kecil dari standar deviasi iklim investasi, maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Output bagian kelima dan keenam dari analisis regresi berganda :

Tabel 33. Anova

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.408	3	6.469	305.379	.000 ^a
	Residual	.975	46	.021		
	Total	20.383	49			

a. Predictors : (Constant), Reformasi Birokrasi, Desentralisasi dan Otoda, Pelayanan Publik

b. Dependent Variable : Iklim Investasi

Tabel 34. Koefisien Regresi

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.935	.076		12.281	.000		
	Desentralisasi dan Otoda	.163	.055	.226	2.991	.004	.182	5.502
	Pelayanan Publik	.205	.057	.309	3.601	.001	.141	7.094
	Reformasi Birokrasi	.366	.053	.483	6.965	.000	.216	4.633

a. Dependent Variable : Iklim Investasi

Analisis :

1. Dari uji ANOVA atau *F test*, didapat Fhitung adalah 305,379 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bias dipakai untuk melihat pengaruh terhadap Iklim Investasi atau bisa dikatakan, desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi secara **bersama-sama** berpengaruh terhadap Iklim Investasi.
2. Uji ANOVA juga bisa dianalisa berdasarkan nilai perbandingan antara nilai Fhitung dengan Ftabel. Berdasarkan tabel F kita dapat mencari nilai F pada derajat kebebasan (dk) ($dk = (n - k - 1) = 50 - 3 - 1 = 46$ dan alpha

0,05.

$F_{0,05} = 3,20$

$F_{hitung} = 305,3$

$305,3 > 3,20$

$F_{hitung} > F_{tabel}$

- Oleh karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_0 ditolak atau menerima H_1 yang artinya desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi secara **bersama-sama** berpengaruh terhadap iklim investasi.
3. Karena tujuannya ingin mencari pengaruh maka yang digunakan sebagai rujukan adalah pada kolom *Standardized Coefficient*, didapat persamaan regresi :

$$Y = 0,226 X_1 + 0,309 X_2 + 0,483 X_3$$

Dimana;

Y = Iklim Investasi

X₁ = Desentralisasi dan Otonomi Daerah

X₂ = Pelayanan Publik

X₃ = Reformasi Birokrasi Penjelasan persamaan regresi :

- Koefisien X₁ = 0,226X₁, menyatakan bahwa setiap penambahan desentralisasi dan otonomi daerah sebesar 1% akan meningkatkan iklim investasi sebesar 0,226%.
 - Koefisien X₂ = 0,309X₂, menyatakan bahwa setiap penambahan pelayanan publik sebesar 1% akan meningkatkan iklim investasi sebesar 0,309%.
 - Koefisien X₃ = 0,483X₃, menyatakan bahwa setiap penambahan reformasi birokrasi sebesar 1% akan meningkatkan iklim investasi sebesar 0,483%.
4. Walaupun persamaan regresi telah terbukti signifikan, tetapi masih bisa dipersoalkan tentang kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk itu perlu pengujian koefisien regresi. Tabel selanjutnya (*coefficients*) menggambarkan koefisien regresi, bahwa berdasarkan nilai Sig. (*significance*) melalui uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen (desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi) dengan hipotesis probabilitas :
- o Jika probabilitas > 0,05, H₀ diterima.
 - o Jika probabilitas < 0,05, H₀ ditolak.

Keputusan :

Terlihat bahwa pada kolom Sig/*significance* untuk variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi semuanya berada di bawah 0,05 (berturut-turut yaitu 0,004, 0,001 dan 0,000) maka H₀ ditolak atau koefisien regresi signifikan, atau desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap iklim investasi kondusif.

Dari hasil analisis data maka uji hipotesis dapat diambil keputusan yaitu H₀ ditolak atau menerima H₁ yaitu ada hubungan atau pengaruh antara kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif.

5. Uji t juga bisa dianalisa berdasarkan nilai

perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel. Berdasarkan tabel t kita dapat mencari nilai t pada derajat kebebasan (dk) ($dk = (n - k - 1) = 50 - 3 - 1 = 46$ dan alpha 0,05.

$t_{0,05} = 2,021$ $t_{Hitung} = 12,281$

$12,281 > 2,021$ $t_{Hitung} > t_{tabel}$

Oleh karena t_{Hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H₀ ditolak atau menerima H₁ yang artinya desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi masing-masing berpengaruh serta memberikan kontribusi terhadap iklim investasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Dukungan alokasi pendanaan struktur kelembagaan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan pembangunan

Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat telah mengalihkan beberapa urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola kegiatan pemerintahannya secara otonom dan mau tidak mau Pemda harus mampu melaksanakan berbagai urusan yang selama ini dilaksanakan oleh pusat.

Kebijakan desentralisasi harus fokus pada penyediaan dukungan pembiayaan dan *insentive* kepada pemerintah daerah agar pemda memiliki cukup sumber daya dan pembiayaan untuk belanja kebutuhan pemda dan juga sekaligus beberapa sanksi jika pemda tidak mampu mengoptimalkan dukungan pembiayaan dan insentif tersebut.

Desentralisasi administrasi mengarah pada redistribusi kewenangan, pertanggungjawaban dan sumber daya keuangan untuk menyediakan pelayanan publik terhadap level pemerintahan yang lebih rendah. Artinya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah maka pemerintah pusat juga harus menyertakan dukungan pendanaannya terhadap pelayanan publik tersebut.

Keuangan daerah dan SDM harusnya proporsional dengan pertanggungjawaban desentralisasi. Untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat seharusnya mempersiapkan alokasi sumber daya baik keuangan dan SDM secara layak serta bantuan teknis. Dalam banyak kasus, pemda tidak dapat mengurus kewenangan desentralisasi kecuali didukung oleh pemerintah pusat.

Masalah pendanaan merupakan masalah klasik pembangunan untuk mencapai tujuannya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dijalankan secara prinsip telah terjadi pelimpahan kekuasaan, fungsi dan sumberdaya dari pemerintah pusat namun dalam beberapa hal pelimpahan tersebut tidak diiringi dengan pelimpahan sumberdaya keuangan atau pendanaan sehingga kinerja pemda melalui SKPDnya yang mengemban tugas dan fungsi membawa pemerintahan lebih dekat kepada masyarakatnya menjadi terhambat.

Terhadap permasalahan ini diharapkan pemerintah daerah melalui diskresi yang telah diberikan pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mampu mengali sumber-sumber pendanaan yang lebih optimal lagi yang didasari dengan kaidah memperhatikan peraturan yang berlaku dan menjaga iklim investasi kondusif. Artinya diharapkan tidak terjadi cara-cara penggalian sumber daya pendanaan dengan menerbitkan perda-perda yang merugikan dunia bisnis/usaha.

2. Tingkat perbedaan implementasi prosedur dengan prosedur ditetapkan.

Pada hakekatnya kondisi kondusif memerlukan kebijakan semua pihak yang terlibat langsung ataupun secara tidak langsung terutama para pemimpin *informal* tokoh masyarakat dan alim ulama serta berbagai *stakeholder* pembangunan lainnya, untuk dapat berdialog apabila ditemukan permasalahan dan masukan positif tentang keberlangsungan investasi di Kabupaten Bekasi baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dan pendayagunaan sumber-sumber alam, dan sumberdaya manusia menurut kepentingan masyarakat Bekasi (*people orientation*) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Berbeda dengan cara-cara dan proses pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan sepihak dan bersifat sentralistik, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini, proses pembangunan daerah harus menjunjung tinggi partisipasi kelompok masyarakat berikut para wakil rakyat di DPRD (*participatory democracy*) dalam pembangunan, antara lain dalam menetapkan prioritas tujuan-tujuan pembangunan daerah. Inilah kita rasakan era otonomi daerah, dimana terdapat kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pola pembangunan yang bermanfaat bagi kese-

jahteraan masyarakat daerah dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki melalui pengembangan kerjasama dengan investor. Dirasa penting lagi adalah mengedepannya praktek *good governance* dan *good corporate governance* harus memadai, baik terkait histori proses perijinan usaha maupun pengelolaannya.

Memperhatikan asumsi dasar filosofi desentralisasi yang dikemukakan di atas (azas *good governance*, *people orientation* dan *participatory democracy*), dengan pengecualian kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lain, maka Pemerintah daerah dapat melakukan sistem perencanaan pembangunan daerahnya yang akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan investasi. Dalam strategi pengembangan investasi ini (khususnya di Kabupaten. Bekasi), harusnya kita mulai berfikir bagaimana penetrapannya agar lebih menarik para investor menamakan modalnya di daerah. Lebih fokus lagi apa terdapat pengembangan *leading/key industry*. Pengembangan industri ini memerlukan pengembangan industri hilir sebagai industri penunjang agar diperoleh penghematan anggaran daerah, sehingga seluruh pengeluaran keuangan daerah sebagai penunjang industri ini dapat ditekan dan lebih terfokus pada industri penunjang bagi pengembangan investasi. Disamping itu, perlu diperhatikan salah satu filosofi desentralisasi yaitu adanya sinergi hubungan antar daerah. Proses pembangunan di daerah-daerah pada era otonomi didorong untuk mengejar ketertinggalan pembangunannya secara serempak. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus melakukan pembenahan dan pembinaan aparatur serta berbagai koordinasi seperti dikemukakan di atas sebagai salah satu pelayanan transportasi.

Harus pula disadari salah satu tantangan terbesar adalah perlunya penyerapan tenaga kerja yang harus terpenuhi apabila ada investasi. Penyerapan tenaga kerja ini lambat laun diiringi dengan suatu persyaratan memadai tentang keterampilan dan keahlian spesialisasi investasi. Saat ini, setelah konsumsi melemah akibat penurunan daya beli masyarakat, investasi menjadi fakta kunci bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat. Namun yang perlu diingat, bagaimanapun juga masuknya investasi baik dari dalam negeri terlebih dari luar negeri,

kita masih mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang mungkin tak akan dikorbankan begitu saja semata alasan ekonomis.

Disamping itu, adanya kemajuan teknologi informasi merupakan solusi tepat, dalam memenuhi aspek percepatan perolehan informasi. Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan informasi on-line, perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk segala hal yang berkaitan dengan investasi dari awal sampai *output* yang dihasilkan. Sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman. Data ini diharapkan disamping dapat menjadi *instrument* informasi masuknya investasi, namun harusnya sampai menjadi *instrument* bagi peningkatan kemampuan masyarakat untuk berkiprah lebih terarah pada pelaksanaan pembangunan di daerahnya sendiri. Diantara konsekwensi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi telah membuka SMS Pengaduan melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi (www.bekasikab.go.id) dapat diakses setiap saat yang menyangkut kepastian usaha investasi, penghormatan kontrak-kontrak usaha, dan keamanan berusaha, penghormatan kontrak-kontrak usaha, dan keamanan berusaha, serta pemberian kepastian pelayanan.

Pelimpahan urusan melalui desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemda harus diiringi dengan standar pelayanan publik yang baik yaitu salah satunya adalah adanya prosedur pelaksanaan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemda dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menetapkan prosedur pelayanan yang standar atau biasa dikenal dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk segala bidang pelayanan publik. SPM yang telah ditetapkan ini harus menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan publik.

Permasalahan perbedaan implementasi prosedur dengan prosedur yang telah ditetapkan bisa diakibatkan oleh banyak hal, misalnya kurangnya sosialisasi prosedur, minimnya kompetensi aparat pelayan publik, tingkat kerumitan

prosedur sehingga perlu disederhanakan dan sebagainya.

3. Peningkatan alokasi anggaran SKPD Pemda Kab. Bekasi

Salah satu tindakan reformasi birokrasi yaitu revitalisasi organisasi perangkat daerah atau SKPD. Revitalisasi SKPD Pemda Kab. Bekasi terkendala masalah pendanaan atau anggaran bahwa peningkatan alokasi anggaran selama ini dirasakan kurang. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan permasalahan pertama bahwa anggaran adalah permasalahan klasik namun bukan berarti tanpa solusi.

Terhadap permasalahan kurangnya alokasi anggaran SKPD Kab. Bekasi untuk mendukung reformasi birokrasi adalah perlu diupayakan penambahan alokasi anggaran agar tiap-tiap SKPD bisa lebih berperan optimal lagi dalam memberikan pelayanan publik.

Salah satu upaya reformasi birokrasi melalui revitalisasi birokrasi adalah mendorong pelaksanaan tata pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan kinerja perangkat organisasi daerah beserta profesionalisme aparat pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan agar mampu meningkatkan investasi dan berpihak pada masyarakat miskin.

Peningkatan alokasi anggaran akan dilakukan dengan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi lokal, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi.

Permasalahan dalam program peningkatan kapasitas keuangan pemda selama 8 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal belum terlaksana secara optimal karena beberapa faktor, diantaranya baru diterbitkannya beberapa peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah serta masih belum mencukupinya kapasitas SDM aparatur pemda di bidang tersebut. Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Dalam perkemba-

ngannya, terdapat beberapa daerah yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah tanpa memerhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut dan bertentangan dengan kepentingan umum sehingga cenderung mendorong terjadinya ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim investasi di daerah.

Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional sangat diperlukan agar problematikan pembiayaan bias diselesaikan.

4. Tingkat kualitas infrastruktur pendukung usaha/bisnis bidang transportasi

Kondisi ekonomi saat sekarang dan mendatang membutuhkan adanya peningkatan peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah, sekalian untuk mengurangi berbagai dorongan masyarakat melakukan kegiatan konsumtif. Apabila ingin menarik investor harusnya lebih paham dulu keberadaan investasi yang perlu dikembangkan sesuai dengan potensi dan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat, dengan kata lain perlunya terdapat kepastian usaha. Disamping perlu faktor pendukung investasi yang memadai seperti faktor kelembagaan pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat, faktor sosial politik serta infrastruktur fisik yang dimiliki daerah. Faktor pendukung investasi tersebut harus siap dan tinggal meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil serta memperbaiki kebijakan yang berpotensi menghambat masuknya investasi. Begitu juga mengenai iklim usaha yang kondusif serta kesediaan tenaga kerja yang cukup. Dengan kondisi tersebut memang bukan hal mudah untuk menarik investasi masuk ke suatu daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur seperti listrik air, jalan, pelabuhan, dan lain sebagainya, kondisi geografis daerahnya, pengalaman daerah dalam mengurus investasi, serta kemauan yang keras dari pemerintah daerah untuk menarik investasi yang ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, disamping itu juga kesiapan dari masyarakat setempat untuk menerima masuknya investasi ke daerahnya. Apabila faktor-faktor tersebut cukup kondusif, niscaya perkembangan investasi akan membaik dan investor

akan tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Terkait dengan hal itu, seminimal mungkin dihindari persoalan yang banyak terjadi pada birokrasi pelayanan pemerintah daerah, termasuk kemungkinan persoalan tentang kepastian hukum/peraturan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya malah tidak mendistorsi iklim investasi ini. Mungkin pula masih diperlukan koordinasi dalam pemerintahan untuk menarik investor antara pemerintah provinsi dan kabupaten melalui penanganan Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Barat agar memberi dukungan penuh/support dalam menumbuhkembangkan investasi ini, di samping tentu peranan perbankan sangat diperlukan dengan pelayanan pemberian kredit investasi maupun kredit modal kerja.

Bidang transportasi merupakan bidang yang sangat vital dalam memperlancar usaha/bisnis khususnya pergerakan arus orang dan barang. Permasalahan yang sering dikeluhkan dalam upaya penciptaan iklim investasi kondusif adalah rendahnya kualitas infrastruktur pendukung usaha/bisnis khususnya bidang transportasi (jalan dan jembatan, kereta api, pelabuhan dan bandara).

Infrastruktur bidang transportasi dalam hal ini adalah salah satunya kualitas jalan raya dan jembatan yang selama ini banyak yang rusak sehingga memperparah tingkat kemacetan. Kabupaten Bekasi sebagai basis daerah industri tentunya harus menyediakan kualitas jalan dan jembatan yang layak agar bisa dilewati oleh truk-truk barang dengan *tonase* yang berat.

Untuk ketersediaan fasilitas kereta api yaitu masih dirasakan kurang dalam menampung jumlah pengguna kereta api yang sebagian besar adalah para pekerja di daerah Kabupaten Bekasi. Kereta api merupakan sarana angkutan yang banyak digunakan masyarakat Bekasi. Stasiun kereta api yang berlokasi di Kabupaten Bekasi adalah Stasiun Tambun, Cikarang dan Lemahabang. Dari ketiga stasiun tersebut, selama tahun 2008 penumpang kereta api berjumlah 1.228.257 orang, atau naik sebesar 30,97% dibandingkan tahun 2007.

Kesimpulan

Sesuai dengan teori dan hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan re-

formasi birokrasi sangat berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi kondusif.

Hal ini karena desentralisasi dan otonomi daerah mampu memaksimalkan fungsi pemerintahan (pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan) agar dapat dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pemberian pelayanan publik melalui pengalihan beberapa urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola kegiatan pemerintahannya secara otonom.

Pelayanan publik dapat mempengaruhi penciptaan iklim investasi kondusif karena terdapatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang prosedur, standar pelayanan, biaya dan akuntabilitasnya dilakukan secara jelas dan pasti.

Demikian juga reformasi birokrasi dapat mempengaruhi penciptaan iklim investasi kondusif karena dengan reformasi birokrasi akan terjadi perubahan kultur birokrasi yang mengarah kepada profesionalisme, beretika, impersonal dan taat aturan, perubahan secara kelembagaan (struktur) yang mengarah kepada perampingan struktur organisasi, perubahan secara ketatalaksanaan (*business proses*) yang mengarah kepada kemudahan mekanisme, sistem dan prosedur birokrasi, perubahan secara fungsi yang mengarah kepada penajaman misi organisasi sehingga kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, efektif dan efisien.

Kesimpulan di atas adalah sesuai dengan penelitian yang berjudul "Kegagalan Pemerintah Dan Turunnya Daya Saing Ekonomi" oleh Maxensius Tri Sambodo dan Latif Adam (keduanya adalah peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, penelitian tersebut dimuat pada Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Universitas Nasional Jakarta, Volume 5/No.09/2009) dan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Choirul Mahfud yang berjudul "Relasi Otonomi Daerah Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik, *Good Governance*, dan Demokratisasi". Penelitian tersebut dimuat pada Jurnal Cakrawala, vol. 1 No. 2 Juni 2007 : 1 - 12, Balitbang Depdagri.

Dari ke 3 (tiga) variabel di atas yang sangat berpengaruh adalah variabel reformasi birokrasi dan variabel pelayanan publik, hal ini karena nilai koefisien beta pada tabel koefisien regresi bahwa variabel reformasi birokrasi memiliki nilai *standardized* koefisien beta tertinggi (0,483) kemudian diikuti oleh variabel pelayanan public (0,309). Variabel reformasi birokrasi sangat berpengaruh pada penciptaan iklim investasi kondusif dikarenakan indikator pemerintah daerah Kab. Bekasi sangat mampu dalam menjalin sinergi (*networking*) dengan pemerintah daerah lain dan juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Variabel pelayanan publik dikarenakan indikator prosedur pelayanan publik Pemda Kab. Bekasi sangat mudah dipahami oleh pelaksana maupun penerima pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Abidin Said Zainal, "Kebijakan Publik", Suara Bebas, Jakarta, 2005.
- Babbie Earl and Halley Fred, "Adventures, in Social Research Data Analysis Using SPSS for Windows 95", Pine Forge Press, California, 1998.
- Danim Sudarwan, "Pengantar Studi Penelitian Kebijakan", Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Denhart Janet & Robert Denhart, "The New Public Service : Serving, Not Steering", M.E. Sharpe Inc, New York, 1984.
- Dunn William N, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik", Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Dwiyanto Agus, dkk., "Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia", Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.
- _____, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Ghozali Imam, "Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program SPSS", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

- Harmon Michael M and Mayer Richard T, "*Organization Theory For Public Administration*", Little, Brown and Company, Boston, 1986.
- Hendratno Edie Toet, "*Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Indonesian Institute of Science (LIPI), "*Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*", LIPI Press, Jakarta, 2007.
- Irianto Agus, "*Statistik : Konsep Dasar dan Aplikasinya*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Jones PIP, "*Introducing Social Theory*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, "*Masalah Sosial Ekonomi Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Pemerintah*", Jakarta, 2009.
- Kountur Ronny, "*Metode Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*", Penerbit PPM, Jakarta, 2007.
- Malang Corruption Watch (MCW), In-TRANS Institute dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), "*Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik, Rekonstruksi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Adil, Berkualitas, Demokratis, dan Berbasis Hak Rakyat*", In-TRANS Publishing, Malang, 2008.
- Nugroho Riant, "*Public Policy*", Edisi Revisi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Pindyck Robert S and Rubinfeld Daniel L., "*Mikroekonomi*", Edisi Keenam Jilid 1, PT. Indeks, Jakarta, 2009.
- Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, "*PPSK Bank Indonesia - LP3E FE-UNPAD*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Purwanto Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, "*Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-masalah Sosial*", Gava Media, Yogyakarta, 2007.
- Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, "*Otonomi, Daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi*", Jakarta, 2005.
- Putong Iskandar, "*Economics, Pengantar Mikro dan Makro*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007.
- Putra Fadillah, "*Senjakala Good Governance*", Averroes Press, Malang, 2009.
- "*Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik, Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*", Gaya Media, Yogyakarta, 2009.
- Riduan M.B.A., M.Pd, dan Prof. Dr. Akdon, M.Pd., "*Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*", Alfabeta, Bandung, 2009.
- Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmad Sodik, "*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*", Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.
- Santoso Singgih, "*Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5.*", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Sarundajang. S.H., "*Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Sedarmayanti, "*Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Siegel Sidney, "*Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Sobandi Baban, "*Etika Kebijakan Publik : Moralitas Profetis dan Profesionalitas Aparat Birokrasi*", Humaniora Utama Press, Bandung, 2004.

- _____, dkk., "Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah", Huma-niora, Bandung, 2006.
- Syukri Agus Fanar, "Standar Pelayanan Publik Pemda Berdasarkan Iso 9001/IWA-4", *Indonesia Quality Research Agency (IQRA)*, Bantul, 2009.
- Tangkilisan Hesel Nogi, "Kebijakan Publik yang Membumi", Lukman Offset, Yogyakarta, 2003.
- Thoha Miftah, "Birokrasi dan Politik di Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, "Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, "Ilmu Administrasi Publik Kontemporer", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, "Public Policy dan Administrasi Publik", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- _____, "Beberapa Kebijaksanaan Birokrasi", PT. Widya Mandala, Yogyakarta. 1991.
- Umar Husein, "Metode Riset Ilmu Administrasi", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- _____, "Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan : Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Wayne Parsons, "Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan", Kencana Prenada Media Group", Jakarta, 2005.